

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi atau *autonomy* berasal dari Bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang di tuangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai otonomi daerah yang seluas-luasnya diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah tersebut berlaku bagi semua daerah di Indonesia termasuk bagi daerah yang memiliki status istimewa dan di berikan otonomi khusus dalam undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan pasal 225 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Utang Rosidin: 2015:75)

Sebagaimana di ketahui bahwa, Indonesia memiliki empat (4) daerah istimewa atau otonomi khusus dari ke empat daerah tersebut salah satunya adalah Provinsi Papua. Otonomi khusus di berikan kepada rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus rumah tanganya sendiri sesuai dengan inisiatif dan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua.

Kewenangan Provinsi Papua mencakup seluruh bidang pemerintah kecuali Pertahanan Keamanan, Moneter Dan Fiskal, Agama dan Peradilan serta Kewenangan tertentu di bidang lain di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, Provinsi Papua di beri kewenangan khusus anatara lain adalah: pengaturan kewenaggan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua di lakukan dengan kekhususan; serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan, keperpihakan dan keadilan secara startegis dan mendasar. selain itu, sebagai perwujudan dari status otonomi khusus ini, Provinsi Papua mendapatkan kuncuran dana otonomi khusus yang besar dari pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN setiap tahun.

Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara bangsa). Dengan otonomi kita harus mengembalikan harkat, martabat dan harga diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah selama puluhan tahun lebih bahkan sejak kemerdekaan telah mengalami marginalisasi. Bahkan mengalami alienisasi dalam segala bentuk pembuatan kebijakan publik. Segala bentuk kebijaksanaan publik yang bersifat di tentukan oleh sekelompok kecil orang di Jakarta, sementara masyarakat di daerah diwajibkan untuk mensukseskannya di dalam implementasi kebijakan tersebut. Sangat memprihatinkan kebijakan negara seperti ini, sangat mungkin muncul gerakan-gerakan di daerah-daerah yang bisa mengagguh stabilitas negara.

Otonomi khusus Papua dalam Jacobus P Solossa (2005:27) lahir karena adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ketidakadilan pemerintah Indonesia terhadap rakyat bangsa Papua. Pada tanggal 26 feberuari 1999 “Tim 100” bertemu dengan Presiden Rebulik Indonesia B J. Habibie. "Tim 100" adalah representasi suara

dari 7 (tujuh) suku/ wilayah adat di Papua. “Tim 100” membawa tuntutan dan aspirasi dari 7 (tujuh) wilayah adat di teritori west Papua kepada Pemerintah Indonesia untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi Pemerintah Indonesia memberikan suatu tawaran untuk mengagalkan aspirasi,tuntutan rakyat Papua yaitu dengan memberikan UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua. UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut tidak berjalan dengan baik sesuai dengan tulisan di kertas hitam-putih secara sistematis dan terstruktur tersebut.

Otonomi khusus di berikan kepada rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri berdasarkan hak-hak masyarakat Papua dan mengenai hak-hak tersebut sudah tertuang dalam uu tersebut. tetapi dalam implementasinya kebijakan dan kewenangan bersifat sentralistik. Sehingga semua kebijakan dari Jakarta tidak tepat sasaran. Buktinya selama 21 tahun implementasi otonomi khusus Papua berjalan belum bisa menyawab semua permasalahan di west Papua. salah satunya adalah Pendidikan yang masih belum maju.

Data BPS Provinsi Papua yang di publikasikan oleh Badan Pusat statistik Provinsi Papua tahun 2021 IPM Provinsi Papua adalah 60,64. Kategori ini berada dalam gategori menengah. Pembagunan sumber daya manusia di Provinsi Papua sejak di perlakukan otonomi khusus yang sudah berjalan 21 tahun terjata belum mampu meningkatkan Pembagunan Sumber Daya Manusia masih tergolong rendah dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dengan uang yang di kuncurkan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah lebih besar seharusnya mampu meningkatkan Pembagunan Sumber Daya Manusia yang hadal dan berkompeten di semua bidang kehidupan. Namun sayangnya pembagunan yang di harapkan oleh masyarakat Papua belum mencapai titik kulminasi. Sejak tahun 2001 pemberian dana dalam rangka otonomi

sudah mencapai Rp. 28 triliun di luar dana perimbangan lainnya., namun begitu belum memberikan dampak perubahan yang signifikan di tanah Papua atas dana yang sebanyak itu. Keyataan seperti ini, apabila pemerintah tidak mengambil langkah maju yang tepat sasaran sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Papua untuk Pembagunan Sumber Daya Manusia yang humanis melalui Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Politik Dan Ekonomi, sampai masa berakhirnya undang-undang otonom khusus yaitu selama 21 tahun sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, sangat mungkin memberikan peluang bagi rakyat Papua untuk meminta solusi lain karena ketidakberhasilan implementasi otonomi khusus.

Dalam Pelaksanaan otonomi khusus perlu di perhatikan di salah satu daerah di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Yahukimo. Yahukimo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua dengan ibu kota Dekai/Sumohai. Sebelum Kabupaten Yahukimo di mekarkan berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Jayawijaya. Namun Kabupaten Yahukimo di bentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2002 dan diresmikan pada 11 Desember 2003. Kabupaten Yahukimo memiliki luas wilayah 17.152 km<sup>2</sup> dan batas wilayah adalah : wilayah kabupaten Yahukimo berbatasan dengan Jayawijaya dan Tolikara sebelah Utara kabupaten Mappi dan Asmat sebelah selatan, kabupaten Mimika di sebelah barat dan kabupaten Pongkor sebelah timur. Kabupaten Yahukimo terbagi kedalam 51 distrik dan 517 kampung.

Dalam perjalannya sistem Pemerintahan di Kabupaten Yahukimo terjata masih memiliki berbagai persoalan-persoalan dasar yang perlu diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, seperti pembagunan Infrastruktur dasar, Ekonomi Kerakyatan, Sosial Budaya, Politik, Hukum, Kesehatan dan Pendidikan yang baik serta keperpihakan dan pemberdayaan kepada rakyat Yahukimo-Papua. Namun sayangnya, sudah 18 tahun berjalan roda pemerintahan di

Kabupaten Yahukimo tetapi belum juga menjawab berbagai persoalan-persoalan tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Yahukimo harus memiliki konsep dan strategis pembangunan yang intens, progresif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat sehingga dapat menjawab semua keluhan-keluhan yang selama ini diharapkan oleh masyarakat Yahukimo. Salah satu persoalan dasar yang musti di prioritaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan yang baik dan humanis sesuai dengan metode dan kurikulum yang berlaku. Saat ini, kita melihat negara-negara dunia seperti: Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia maju bukan karena memiliki Gedung yang besar, menciptakan segala hal baru (inovasi), tetapi semua kemajuan itu dampak dari sumber daya manusia yang hadal dan kompeten di setiap bidang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Yahukimo mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia Yahukimo - Papua melalui Pendidikan yang baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK dan PERGURUAN TINGGI tetapi juga perlu meningkatkan pelatihan profesi di setiap bidang. Ketika sumber daya manusia Yahukimo sudah maju maka rakyat Yahukimo mampu memimpin dirinya sendiri dan mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berkesinambungan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Yahukimo harus memberikan ruang kepada organisasi nonpemerintah, sekolah-sekolah dari gereja seperti; YPK, YPPGI, sekolah-sekolah swasta, Sekolah Misionaris, LSM, dan lainnya untuk sama-sama Membangun Sumber Daya Manusia Yahukimo. Karena dampak pembangunan Sumber Daya Manusia dari lembaga nonpemerintah/swasta dan gereja-gereja di tanah Papua pada umumnya dan lebih khususnya Yahukimo sangat nyata dan membantu menyelesaikan tugas pokok pemerintah, untuk itu pemerintah jangan mengagap organisasi nonpemerintah sebagai acuan tetapi menerima sebagai organisasi yang mitra dan

mempunyai andil besar dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Yahukimo. Karena sebelum Pemerintah Belanda dan Indonesia masuk dengan sistem pendidikannya, yang lebih dulu ada dan memberikan Pendidikan adalah Misionaris. Kompetensi dan kualitas manusia Yahukimo yang di didik oleh para Misionaris sangat berbeda dan didikan para Misionaris tetap eksis sampai saat ini.

Selain itu, data BPS Kabupaten Yahukimo yang di publikasikan tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo menunjukan bahwa, Keberhasilan pembangunan Kabupaten Yahukimo dapat dilihat dari angka IPM. IPM Kabupaten Yahukimo tahun 2020 sebesar 49,37. Menurut kategori, angka ini tergolong kategori rendah, yakni dibawah 60. Meskipun tergolong rendah, namun selama periode 2016–2020, IPM Kabupaten Yahukimo selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan manusia di Kabupaten Yahukimo selalu mengalami kemajuan.

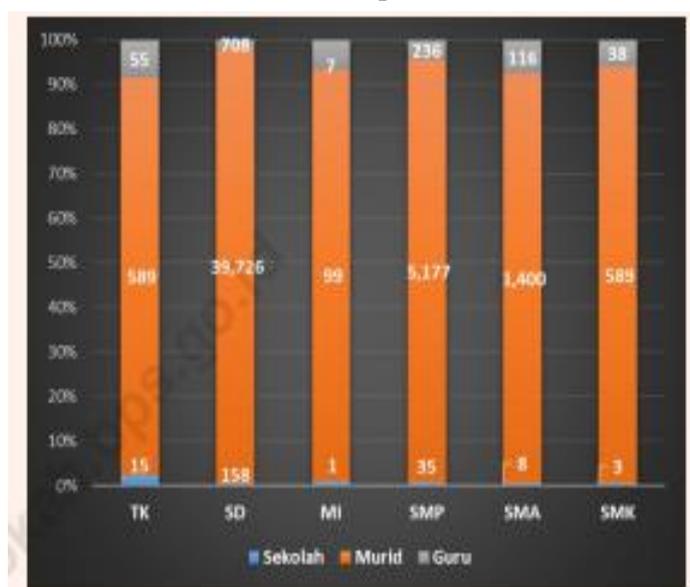
Namun sayangnya, data BPS Kabupaten Yahukimo tersebut jauh berbeda dengan fakta objektif yang ada di kabupaten Yahukimo. Yahukimo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki 51 distrik dan 517 kampung dan memiliki 12 suku besar. Dan masyarakat Yahukimo sendiri mayoritas berdomisili di gunung-gunung, lembah-lembah dan rawa-rawa jauh dari pusat kota Yahukimo. Persebaran penduduk Yahukimo mayoritas perdomisili jauh dari pusat kota Yahukimo. Hanya satu distrik yaitu distrik dekai kota Yang berada di pusat kota Yahukimo selebihnya tersebar luas di teritori Yahukimo dan jauh dari pusat kota Yahukimo. Sehingga di setiap distrik dan kampung – kampung memiliki sekolah dasar dan juga SMP dan SMA. Namun sayangnya, semua sekolah-sekolah ini tidak berjalan dengan baik dan mulus. Karena berbagai persoalan dan tantangan yang di hadapi oleh tenaga pengajar (guru/ASN) dan para murid dan juga karena kurangnya sarana dan prasarana.

Pembangunan Sumber Daya Manusia perlu diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Pendidikan, pelatihan profesi dan seminar-seminar. Supaya masyarakat Yahukimo memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki keahlian khusus di setiap bidang kehidupan sehingga mampu mengelola Sumber Daya Alam yang kaya raya secara mandiri dan berkesinambungan.

Berbagai persoalan-persolan yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Yahukimo. Dalam upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Yahukimo West Papua yang handal, kompeten, akuntabel, berintegritas dan progresif antara lain adalah;

Yang pertama adalah; penyediaan sarana dan prasarana yang buruk. Seperti di dikutip oleh Papua go.id, oleh seorang kepala dinas Pendidikan kabupaten Yahukimo Drs. N Manuaron bahwa 82 persen gedung sekolah di kabupaten Yahukimo rusak berat. Pembangunan dan penyediaan Infrastruktur dan sarana dan prasara dasar menjadi tolak ukur untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Yahukimo.

Tabel : 4.1. Banyaknya Sekolah, Murid Dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Yahukimo



Sumber : BPS Kabupaten Yahukimo, 2022

Pada tahun ajaran 2019/2020, di Kabupaten Yahukimo terdapat 15 unit TK. 158 unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 35 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 3 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta 8 unit sekolah menengah umum (SMU). Jumlah murid terdapat pada jejang SD sebanyak 37.726 murid. Begitu juga jumlah guru, terbanyak di jenjang SD yaitu 708 guru.

Berdasarkan data bps diatas gedung – gedung sekolah yang ada saat ini kapasitasnya tidak cukup dan tidak layak untuk menampung sebagian siswa/I sehingga di dalam satu ruangan dua kelas di gabungkan dan duduk di lantai, sehingga tidak efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Selain itu, tidak ada suasana kenyamanan dan ketenangan bagi siswa/I dan tenaga pengajar (Guru) karena tidak ada sarana penunjang yang baik di dalam ruangan sekolah-sekolah. Selain itu, salah satu kendala yang di hadapi adalah transportasi. Untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok hanya menggunakan pesawat kecil (MAF) sehingga berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana yang buruk.

Kemudian salah satu hal mendasar adalah tidak adanya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini guru/ASN yang bertugas di 165 sekolah di seluruh Yahukimo. Supaya masyarakat merawat dan menjaga fasilitas sekolah yang di bangun oleh pemerintah melalui dinas Pendidikan tersebut. Namun sayangnya, karena tidak adanya sosialisasi maka pembangunan gedung sekolah yang di bangun oleh pemerintah di tutupi oleh rumput. Contoh: SD Impres Soba. Karena tidak ada guru di tempat tugas dan tidak ada sosialisasi maka sekolah tersebut selama tiga tahun ditutupi oleh rumput. Hal ini merupakan salah satu kelalaian pemerintah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat setempat sehingga tidak ada partisipasi dari masyarakat.

Yang kedua adalah; Tenaga pengajar (Guru/ASN) tidak menetap di tempat tugas. seperti di kutip dari media online suara papua. com oleh salah satu kepala sekolah SD negeri Mugi kabupaten Yahukimo, Simson Siep, sejumlah guru di Yahukimo tidak jalankan tugas dan hanya makan gaji buta. Kondisi SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Yahukimo sangat memprihatinkan, lantaran guru-guru tidak menjalankan tugasnya karena lebih memilih tinggal di kota Wamena, Jayapura dan Pusat Kota Yahukimo ketimbang beta tinggal di tempat tugas sesuai Surat Keputusan (SK) penempatan dari pemerintah.

Seharusnya bapak/I guru yang di bayar oleh negara mempunyai beban dan tanggungjawab moril untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sayangnya Bapak/I guru yang bertugas di Yahukimo tidak menetap di tempat tugas dan perkeliaran di pusat-pusat kota karena sudah merasakan nyaman, ketenangan dan kemudahan di pusat kota-kota. Sehingga anak-anak murid yang berada di pelosok-pelosok terlantar dan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan potensi yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya anak-anak sekolah mempunyai hasrat yang tinggi untuk belajar dan mengembangkan kualitas akademiknya, namun yang menjadi kendala adalah guru tidak berada di tempat tugas. sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok sebenarnya mempunyai tenaga guru-guru honorer (sukarela) tetapi tidak efektif memberikan Pendidikan kepada murid karena berbagai persoalan seperti; tidak di berikan honor, dan juga berdampak pada kualitas dan konsep mengajar.

Yang ketiga adalah : Situasi sosial yang tidak kondusif. Situasi sosial ini menjadi salah satu penghambat proses Pendidikan di Kabupaten Yahukimo. Situasi sosial selalu berubah berdasarkan dengan waktu yang berjalan sehingga sangat sulit untuk di bendung dan berdampak pada kualitas Pendidikan menjadi semakin buruk. Misalnya, di dikutip oleh media online Suara Papua. Com terjadi perang suku antara suku Kimyal

meyerang suku Yalli di Gereja Efanistia yang terjadi pada Minggu (03/10/2021), sekitar pukul 12.45 WIT. Hal tersebut di benarkan oleh seorang kepala suku kimyal Nopius Yalak . Kerusakan Yahukimo menyebabkan enama orang tewas dan 41 orang luka-luka. Penyebab kerusakan Yahukimo disinyalir karena adanya penyerangan oleh suku Kimyal kepada suku Yalli. Di duga karena meninggalnya mantan bupati Yahukimo Abok Busup di Jakarta. Dengan isiden itu semua aktifitas birokrasi pemerintah dan Pendidikan sementara di perhentikan selama 2 bulan.

Karena tidak adanya kebijakan dari otoritas terkait tentang nasib siswa/I di Kabupaten Yahukimo selama 4 bulan. Maka pada tanggal 20 januari 2022 anak-anak sekolah melakukan aksi demonstrasi damai di Kantor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Dikutip dari CNN.Indonesia, 24 januari 2022. Aksi tersebut di benarkan oleh Thoni Luku perwakilan masa aksi yang juga adalah seorang pelajar. Aksi demo damai pelajar tersebut untuk meminta penjelasan tentang Pendidikan mereka. Penempatan militer di 3 sekolah persetujuan dari pemda . Itu artinya, pemerintah Kabupaten Yahukimo mematikan Sumber Daya Manusia dan melanggar hak-hak dasar anak-anak sekolah untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan humanis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Sebenarnya pemerintah yang konsen dan mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia namun justru pemerintah melumpuhkan dan mematikan Sumber Daya Manusia (SDM) Yahukimo demi pertahanan keamanan dan dengan kebijakan yang bias tanpa mempertimbangkan dampak positif dan negatif.

Dalam konstitusi negara Indonesia hak mendapat Pendidikan dalam UUD RI 1945 pasal 31 tentang Pendidikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan kemudian setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. UNESCO sebagai organisasi dunia dalam bidang

Pendidikan yang juga di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia, telah mengatur hak atas pendidikan yakni, Pendidikan dasar yang gratis,wajib dan bersifat universal.

Yang keempat adalah: Pemberian uang pemodokan kepada Mahasiswa/I Yahukimo berlarut-larut. Seperti di kutip oleh media cecos online 24/09/2021 mahasiswa/I Yahukimo meminta dana bantuan studi di cairkan. Mahasiswa/I di seluruh Indonesia meminta kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo segera mencairkan dana bantuan SPP. Pemerintah daerah, kepala dinas Pendidikan,Bupati,Sekda dan Kepala Keuangan segera mencairkan dana. Mediasi dan komunikasi ini di lakukan untuk pemerintah segera mencairkan dana supaya para mahasiswa/I bisa membayar registrasi dan tungakan di kampus. Karena keterlembatan pemerintah dalam mencairkan dana sebanyak mahasiswa/I di seluruh Indoonesia cuti kuliah.

Uang pemodokan (bantuan spp) adalah uang yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo dari APBD dan dana otsus Papua kepada seluruh Mahasiswa/I Kabupaten Yahukimo di seluruh korwil-korwil se- Indonesia. Namun sayangnya, Pemerintah terlambat menyalurkan dana tersebut ketangan mahasiswa/I Yahukimo di seluruh Indonesia. Sebelumnya uang pemodokan dicairkanh bulan Juni-Juli setiap tahun namun beberapa tahun belakangan ini Pemerintah mencairkan dana kepada mahasiswa/I bulan November- Desember. Kalau pemerintah jeli melihat persoalan dan kebutuhan yang di hadapi oleh mahasiswa/I Yahukimo seharusnya di cairkan bulan Juni -Juli agar mahasiswa/I bisa registrasi dan membayar semua tunggakan di kampus. Namun sayangnya, Pemerintah tidak paham situasi dan kondisi yang di hadapi oleh Mahasiswa/I Yahukimo. Sehingga banyak Mahasiswa/I Yahukimo yang cuti kuliah niscaya tidak ada ruang atau kesempatan untuk mengembagkan kualitas dan kababilitas akademiknya. Maka, kebijakan pemerintah seperti ini berdampak pada penurunan indeks pembagunan Sumber Daya Manusia di Yahukimo west Papua.

Yang ke lima adalah : Virus Corona yang melanda dunia termasuk Papua. Virus Corona adalah salah satu virus mematikan yang muncul di Wuhan Cina akhir tahun 2019. Virus Corona ini memakan ratusan bahkan jutaan korban jiwa manusia di dunia. Dampak dari virus ini melumpuhkan semua bidang kehidupan manusia . Dalam konteks ini, di bidang Pendidikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan Papua.

Akibat Virus Corona proses belajar mengajar menerapkan dengan menggunakan metode daring (online). Dampak dari Virus Corona juga di rasakan oleh para pelajar PAUD, TK, SD, SMP, S MA/SMK yang ada di kabupaten Yahukimo. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk belajar daring (online) karena jaringan buruk dan tidak semua pelajar mempunyai Hp dan Pulsa Data untuk terhubung dalam proses belajar mengajar lewat daring (Online). selain itu, para pelajar di Kabupaten Yahukimo selama pandemik Covid-19 Pemerintah dalam hal ini dinas terkait mengambil langkah alternatif yaitu guru-guru di setiap sekolah menyediakan modul sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dan kemudian di bagikan kepada siswa/i. Sehingga proses belajar mengajar seperti ini tidak efektif. Covid-19 menjadi Penghambat Pembangunan Sumber Daya Manusia di Yahukimo – Papua dan Dunia.

Berdasarkan uraian masalah diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tentang Presepsi Mahasiswa Papua Tentang Implementasi Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Yahukimo (studi berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)

## **1.2 Rumusan masalah**

Dengan melihat masalah pada uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Presepsi Mahasiswa Papua Tentang Implementasi Otonomi Khusus jilid 1 Bagi Provinsi Papua Terhadap Pembagunan Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Yahukimo.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

Untuk menganalisa dan mendiskripsikan Prespsi Mahasiswa Papua Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 Terhadap Pembagunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Yahukimo,Provinsi Papua.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbagan pemikiran bagi kemajuan Ilmu Administrasi Publik di bidang kajian implementasi kebijakan, khususnya yang berkaitan Presepsi Mahasiswa Papua Tentang Imlementasi Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 Terhadap Pembagunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Yahukimo.

#### 2. Secara praktis

Hasil penelitian, menjadi input bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo yaitu perbaikan Pembagunan Sumber Daya Manusia dan sebagai refrensi praktis dalam memperbaiki Pembaguanan Sumber Daya Manusia di daerah-daerah lain di tanah Papua.